

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI
DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA PRABUMULIH**
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola keuangan Aset Daerah)

SKRIPSI



Nama : Dian Permata Sari
NIM : 222013201

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017

**PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH
DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH
DI KOTA PRABUMULIH
(Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola keuangan Aset Daerah)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar sarjana**



**Nama : Dian Permata Sari
NIM : 222013201**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2017**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIAN PERMATA SARI

NIM : 22 2013 201

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Palembang, 10 Februari 2017

Penulis



DIAN PERMATA SARI

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang**

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah)

Nim : Dian Permata Sari

Nim : 222013201

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

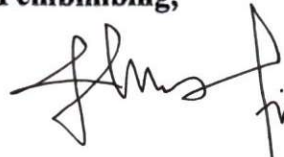
Program Studi : Akuntansi

Mata kuliah pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan

Pada Tanggal.....¹¹/3-2017.....

Pembimbing,



Nina Sabrina, S.E., M.Si

NIDN/NBM:0216056801/851119

Mengetahui,

Dekan

a.b. Ketua Program Studi Akuntansi



Betri sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA

NIDN/NBM:0216106902/944806

Motto :

- ❖ Tidak ada yang tak mungkin didunia ini semua impian kita pasti akan dapat tercapai jika kita selalu berusaha dan selalu berdoa kepada allah Swt.

(Dian Permata Sari)

Terucap syukur pada mu Allah SWT

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

- ❖ Papa dan Mamaku Tercinta
- ❖ Saudariku Rani Widayanti S.pd
- ❖ Kekasihku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Pembimbing Skripsi
- ❖ Almamaterku

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PRAKATA

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobilalamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih”.

Pendapatan Asli daerah merupakan Penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dan wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Dimana pendapatan asli daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah di era otonomi daerah sekarang ini.

Adapun penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua kajian pustaka, bab ketiga metode penelitian, bab keempat pembahasan dan bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam penulisan skripsi ini tentu banyak sekali pihak yang telah memberikan bantuan baik bentuk moril maupun materi. Oleh karena itu penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih terutama pada kedua orang tuaku yang tercinta papa Estiwiyono dan mamaku Yuran serta ayukku yang selalu menjadi motivator utama dalam menjalani perkuliahan sampai saat ini dan selalu mendoakan ku hingga aku bisa menyelesaikan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih untuk bapak Nina Sabrina, S.E., M.Si selaku pembimbing saya yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta saran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang dan seluruh jajaran Staf Universitas Muhammadiyah Palembang
1. Bapak H.Drs. Fauzi Ridwan, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP beserta staf.
2. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Mizan, S.E., M.Si., Ak., CA selaku ketua program dan sekretaris program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Ibu Nina sabrina, S.E.,M.Si Selaku Pembimbing saya terimakasih telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan serta saran sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Hj. Sa'adah Siddik, S.E., Ak., M.Si., CA selaku pembimbing akademik.
5. Kepala DPPKAD dan serta Sekertaris DPPKAD yang telah memberikan data dan informasi yang saya butuhkan.

6. Pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas budi baik seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan demi penyempurnaan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penulis dan para pembaca sebagai bahan referensi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, Februari 2017

penulis



Dian Permata Sari

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN/COVER i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT iii

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI iv

HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO..... v

HALAMAN PRAKATA vi

HALAMAN DAFTAR ISI..... ix

HALAMAN DAFTAR TABEL..... xiii

HALAMAN DAFTAR GAMBAR..... xiv

HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN xv

ABSTRAK..... xvi

BAB I PENDAHULUAN 1

 A. Latar Belakang Masalah 1

 B. Rumusan Masalah..... 5

 C. Tujuan Penelitian..... 6

 D. Manfaat Penelitian..... 6

BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Landasan Teori.....	7
1. Pendapatan Asli Daerah	7
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah.....	8
2. Pajak Daerah.....	8
a. Pengertian Pajak Daerah	8
b. Jenis Pajak dan Objek Pajak.....	9
c. Klasifikasi Pendapatan Pajak Daerah.....	10
d. Tarif Pajak.....	15
e. Tata Cara Pemungutan Pajak.....	17
f. Kadaluwarsa Penagihan Pajak.....	18
3. Retribusi Daerah	18
a. Pengertian Retribusi Daerah	18
b. Objek Retribusi Daerah.....	19
c. Subjek Retribusi Daerah	22
d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi.....	23
e. Tata Cara Pemungutan Retribusi.....	24
f. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi.....	24
g. Klasifikasi Pendapatan Retribusi Daerah.....	24
B. Penelitian Sebelumnya.....	35
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian.....	39

B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Operasionalisasi Variabel	40
D. Populasi dan Sampel.....	41
E. Data yang Digunakan.....	41
F. Metode Pengumpulan Data.....	42
G. Analisis Data dan Teknik Analisis Data	43
H. Teknik Analisis	44
a. Statistik Deskriptif.....	45
b. Uji Normalitas.....	45
c. Uji Asumsi Klasik.....	45
d. Analisis Regresi Berganda.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
A. Hasil Penelitian	50
1. Sejarah Singkat DPPKAD.....	50
2. Visi, Misi,	52
a. Visi.....	52
b. Misi	52
3. Struktur Organisasi	54
B. Hasil Pengelolaan Data	55
1. Statistik Deskriptif	55
2. Uji asumsi Klasik.....	56
a. Uji Normalitas Data.....	56
b. Uji Autokorelasi.....	58

c. Uji Multikolineritas.....	59
d. Uji Heteroskedasitas.....	60
e. Korelasi dan koefisien Determinasi.....	61
f. Analisis Regresi Linier Berganda.....	62
3. Uji Hipotesis.....	64
a. Uji F.....	64
b. Uji t.....	66
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Anggaran dan Realisasi pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2006-2015.....	4
Tabel I.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2006-2015.....	5
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	40
Tabel IV.1	Statistik Deskriptif.....	55
Tabel IV.2	Hasil Pengujian Normalitas Data.....	57
Tabel IV.3	Hasil pengujian Autokorelasi.....	58
Tabel IV.4	Hasil Pengujian Multikolineritas	59
Tabel IV.5	Hasil pengujian Heterokedasitas.....	60
Tabel IV.6	Hasil Pengujian Korelasi dan Detreminasi	61
Tabel IV.7	Hasil uji Regresi.....	62
Tabel IV.8	Hasil Uji F	65
Tabel IV.9	Hasil Uji t.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Organisasi DPPKAD Kota Prabumulih	54
-------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Data Realisasi Anggaran 2013-2015 perbulan

Lampiran 2 :Hasil Pengolahan SPSS

Lampiran 3 : Surat Keterangan Selesai Riset

Lampiran 4 : Sertifikat Membaca Al-Qur'an

Lampiran 5 :Sertifikat TOEFL

Lampiran 6 : sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)

Lampiran 7 :Kartu Aktivitas Bimbingan Skripsi

Lampiran 8 :Biodata Penulis

ABSTRAK

Dian Permata Sari/222013201/2017/Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih (Studi Kasus Dinas Pendapatan Asli Daerah)

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap pendapatan asli daerah di kota prabumulih dan apakah pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh parsial terhadap pendapatan asli daerah di kota prabumulih. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh simultan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Prabumulih dan Untuk mengetahui pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh parsial terhadap pendapatan asli daerah di Kota Prabumulih. Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD, dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Kota Prabumulih dan secara simultan menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah di Kota Prabumulih. Besarnya pengaruh kedua variabel adalah 92,6% sedangkan sisanya 7,4% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

Dian Permata Sari/222013201/2017/ *influence of Regional Income Taxes and Levies to Regional Revenue In Prabumulih (Regional Revenue Office Case Studies)*

The problem of this study is Are local tax revenues and levies simultaneous effect on revenue in Prabumulih and whether the local tax revenues and levies a partial effect on revenue in Prabumulih. The purpose of this study was to determine local tax revenues and levies simultaneous effect on revenue in Prabumulih and to know the local tax revenues and levies a partial effect on revenue in the City Prabumulih. research include the type of associative research. The data used are primary data and secondary data. Data collection techniques using documentation. Analysis of the data used is quantitative analysis and research qualitative. Result showed partial positive effect on the local tax revenue, and levies positive effect on PAD in Prabumulih and simultaneously shows that the local taxes and levies positive effect on revenue in Prabumulih. The amount of influence between the two variables was 92.6% while the remaining 7.4% is explained by other variables not included in this study.

Keyword: *Regional tax, Retribution tax, regional origional income*

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. dimana pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu penyumbangan pendapatan yang banyak didapatkan oleh pendapatan asli daerah yaitu dari pajak.

Pajak merupakan sumber pendapatan negara paling besar dari sumber lainnya. Pajak itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu pajak negara dan pajak daerah. Pajak daerah terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Menurut UU nomor 28 tahun 2009 Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah salah satu pos terpenting dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Disamping pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan sumber pendapatan penyumbangan PAD yang dapat membantu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dimana retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut Mardiasmo (2015:12) retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah terdiri dari menjadi tiga golongan yaitu retribusi jasa umum yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penyediaan dan penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera-tera ulang, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Retribusi jasa usaha terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat pelelalangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, dan retribusi rumah potong hewan. Retribusi peizinan tertentu terdiri

dari retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin gangguan/ keramaian, dan retribusi izin treyek.

Sumber-sumber penerimaan ini sangat penting untuk menjalankan kegiatan dari masing-masing tingkat pemerintahan, karena tanpa adanya penerimaan yang cukup maka program-program pemerintah tidak akan berjalan secara maksimal. Semakin luas wilayah, semakin besar jumlah penduduk, semakin kompleks kebutuhan masyarakat maka akan semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Demikian juga halnya kota prabumulih memiliki konsekuensi adanya tuntutan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga dalam membiayai kegiatan pembangunan daerahnya. Kota prabumulih dari tahun ketahun memulai pembangunan baik dari sarana fasilitas pemerintah maupun umum sampai dengan pembangunan sumber daya manusia.

Sementara itu permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber pajak daerah dan retribusi daerah adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mentayani dkk (2014) hasil penelitian bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah pada kota dan kabupaten di provinsi kalimantan selatan. Menurut Toar dkk (2016) hasil penelitian menunjukkan kontribusi dari retribusi daerah masuk pada kriteria sedang retribusi juga

tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Menurut Muhammad (2014) hasil penelitian menunjukkan secara parsial bahwa koefisien kontribusi pajak daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah dalam merealisasikan pendapatan pajak daerah tidak tercapai pada tahun 2009 dan tahun 2015. Retribusi daerah mengalami tidak tercapainya anggaran hampir setiap tahunnya. Akan tetapi retribusi daerah tercapai hanya pada tahun 2009. Pendapatan Asli Daerah Mengalami tidak Tercapainya pada tahun 2010 dan tahun 2015. berikut ini daftar pendapatan realisasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2006-2015.

Tabel I.1
Pendapatan Pajak Daerah,Retribusi Daerah Dan PAD
Tahun 2006-2015

Tahun	Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Retribusi Daerah	Realisasi PAD	% Pajak Daerah	% Retribusi Daerah	% PAD
2006	2.792.992.807	3.021.828.801	14.903.889.776	102,56%	93,42%	122,55%
2007	3.376.075.393	2.623.450.403	15.876.986.979	112,74%	79,18%	127,07%
2008	5.210.793.591	3.182.583.024	16.457.792.427	166,26%	99,16%	107,35%
2009	5.201.416.208	4.054.675.956	21.713.639.281	97,66%	122,22%	113,10%
2010	6.171.585.652	2.305.102.200	25.215.405.648	113,74%	56,95%	93,48%
2011	9.798.712.170	2.201.003.313	32.107.805.653	128,29%	76,32%	126,63%
2012	11.781.056.276	3.311.460.725	40.674.603.066	133,04%	79,42%	121,59%
2013	14.339.310.860	3.250.045.950	51.168.237.018	115,87%	61,27%	108,04%
2014	18.822.366.243	2.104.981.860	64.169.588.731	101,69%	45,35%	103,26%
2015	20.179.756.935	3.084.118.802	72.236.033.964	98,22%	55,13%	79,14%

Sumber: DPPKAD Kota Prabumulih, 2017

Berdasarkan uraian latar belakang, dan beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian sebelumnya, untuk itulah peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul” **Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih**”

2. Rumusan Masalah

- a. Apakah Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih?
- b. Apakah Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berpengaruh Parsial Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih?

3. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih
- b. Untuk Mengetahui Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih

4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

a. Bagi Penulis

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih

b. Bagi DPPKAD Kota Prabumulih

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, pemikiran, saran, dan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih

c. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkam dapat menjadi refrensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2012:101) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Siregar (2015:31) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi:

- 1) Pajak daerah
- 2) Retribusi daerah
- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu pendapatan daerah yang diterima daerah wilayahnya sendiri yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Undang-Undang 28 Tahun 2009 Menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran rakyat dan membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

b. Jenis Pajak dan Objek Pajak

Menurut Mardiasmo (2015:13) menjelaskan jenis Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian:

1) Pajak provinsi, terdiri dari:

- a) Pajak kendaraan bermotor
- b) Bea balik nama kendaraan bermotor
- c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- d) Pajak air permukaan dan
- e) Pajak rokok

2) Pajak kabupaten/ kota, terdiri dari:

- a) Pajak hotel
- b) Pajak restoran
- c) Pajak hiburan
- d) Pajak reklame
- e) Pajak penerangan jalan
- f) Pajak mineral bukan logam dan batuan
- g) Pajak parkir
- h) Pajak air tanah
- i) Pajak sarang burung walet
- j) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
- k) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

c. Klasifikasi Pendapatan Pajak Daerah

Menurut Siregar (2015:133) klasifikasi pendapatan pajak daerah terdiri dari:

- 1) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah pajak yang dipungut atas penyerahan kendaraan bermotor. Objek BBNKB adalah penyerahan hak milik dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek BBNKB adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan hak milik dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- 2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor. Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaran bermotor adalah konsumen yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor.
- 3) Pajak Air Permukaan adalah pemungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi. Air permukaan tidak termasuk air laut, kecuali air laut tersebut telah dimanfaatkan didarat. Objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan.

- 4) Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah. Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Pajak rokok termasuk pungutan daerah provinsi.
- 5) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Pengertian hotel yang dimaksud dalam pajak hotel meliputi hotel, motel, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, dan rumah kos yang memiliki kamar lebih dari 10. Pajak hotel termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.
- 6) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Pengertian restoran dalam pajak restoran meliputi restoran, rumah makan, kafe, warung, bar, jasa boga, dan katering. Pajak restoran termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.
- 7) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Hiburan meliputi tontonan film (bioskop), pegelaran musik,

pegelaran tari, pegelaran busana, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran, diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan bilyar, golf, bowling, pacuan kuda, pacuan kendaraan bermotor, ketangkasan, panti pijat, refleksi, mandi uap, pusat kebugaran, dan pertandingan olahraga. Pajak hiburan termasuk pungutan daerah kabupaten/ kota.

- 8) Pajak Reklame adalah pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame. Objek pajak reklame adalah penyelenggaraan reklame. Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. Bentuk-bentuk reklame yang dikenakan pajak meliputi papan, billboard, vidiotron, megatron, kain, stiker, selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide, dan reklame peragaan. Pajak reklame termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.
- 9) Pajak Penerang Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik. Objek pajak penerang jalan adalah penggunaan tenaga listrik. Subjek pajak penerang jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Pajak penerang jalan dikenakan baik terhadap penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri maupun penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari sumber lain. pajak penerangan jalan termasuk pungutan daerah/kota.
- 10) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan. Objek pajak parkir adalah penyelenggaran tempat parkir

diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan poko usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Pajak parkir termasuk pungutan pajak daerah kabupaten/kota.

- 11) Pajak Air Tanah adalah pungutan daerah atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam tanah atau bebatuan dibawah permukaan tanah. Objek pajak air tanah adalah pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang mengambil dan memanfaatkan air permukaan. Pajak air tanah adalah pungutan daerah kabupaten/ kota.
- 12) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet. Objek pajak burung walet adalah pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet. Subjek pajak burung walet adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengelolaan, pengusahaan, dan pemanfaatan sarang burung walet. Pajak sarang burung walrt termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.
- 13) Pajak Mineral Bukan Logam Dan Bantuan adalah pajak atas kegiatan mineral bukan logam dan bantuan. Objek pajak mineral bukan logam dan bantuan adalah mineral bukan logam dan bantuan seperti asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu

apung, batu permata, bantonit, dolomit, feldspar, garam batu, grafit, granit, andersit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, opsiden, oker, pasir, dan kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosit, zeolit, basal, dan trakit. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan termasuk pungutan daerah/ kabupaten/ kota.

- 14) Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan. Objek PBB adalah bumi dan/ atau bangunan. Subjek PBB adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak memperoleh manfaat, memiliki, atau menguasai bumi dan/ atau bangunan. PBB termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.
- 15) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) adalah pungutan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/ atau bangunan. Subjek BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. BPHTB termasuk pungutan daerah kabupaten/kota.

d. Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:13) menjelaskan tarif untuk setiap pajak adalah:

- 1) Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
 - a) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi 2% (dua persen)
 - b) Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 2) Tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- 3) Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).
- 4) Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama 20% (dua puluh persen)
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

- 5) Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:
 - a) Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dan
 - b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)
- 6) Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan bermotor dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi
- 7) Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 8) Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok
- 9) Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen)
- 10) Tarif pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 11) Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen)

- 12) Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen)
- 13) Tarif pajak penerang jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 14) Tarif pajak mineral bukan logam dan bantuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen)
- 15) Tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen)
- 16) Tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen)
- 17) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen)
- 18) Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
- 19) Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen)

e. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:15) menjelaskan pemungutan pajak dilarang diborongkan. Setiap pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan kepala daerah dibayar dengan menggunakan surat

ketetapan pajak daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis dan nota perhitungan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), dan/ atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), dan/ atau surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).

f. Kedaluwarsa Penagihan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:15) menjelaskan hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

3. Retribusi Daerah

a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:15) menjelaskan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut Indra (2002:52) menjelaskan retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas pelayanan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh pemda bagi

kepentingan masyarakat, sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 menjelaskan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah Merupakan pungutan daerah sebagai pemberian perizinan tertentu dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan pemerintah daerah bagi kepentingan masyarakat dan membiayai pelaksanaan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:16) menjelaskan yang menjadi objek daerah adalah:

1) Jasa umum

Jasa umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kementerian umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2) Jasa usaha

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta

3) Perizinan tertentu

Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Menurut Mardiasmo (2013:16) menjelaskan objek retribusi daerah adalah:

1) Retribusi Jasa Umum

Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum adalah:

- a) Retribusi pelayanan kesehatan
- b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
- c) Retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil
- d) Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum
- f) Retribusi pelayanan pasar
- g) Retribusi pengujian kendaraan bermotor

- h) Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i) Retribusi penggantian biaya cetak peta
- j) Retribusi penyediaan dan /atau penyedotan kakus
- k) Retribusi pengelolaan limbah cair
- l) Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m) Retribusi pelayanan pendidikan
- n) Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

2) Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi:

- 1) Pelayanan dengan menggunakan/ memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
- 2) Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usaha adalah:

- a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b) Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan
- c) Retribusi tempat pelelangan
- d) Retribusi terminal
- e) Retribusi tempat khusus parkir
- f) Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
- g) Retribusi rumah potong hewan

- h) Retribusi pelayanan kepelabuhanan
- i) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j) Retribusi penyebrangan di air dan
- k) Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Objek retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a) Retribusi izin mendirikan bangunan
- b) Retribusi izin mendirikan bangunan
- c) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d) Retribusi izin gangguan
- e) Retribusi izin treyek dan
- f) Retribusi izin usaha perikanan

c. Subjek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2013:18) menjelaskan subjek retribusi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

- b. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh dari pemerintah daerah

d. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Menurut Mardiasmo (2013:18) menjelaskan prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi adalah sebagai berikut:

- 1) Retribusi Jasa Umum, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Yang dimaksud dengan biaya disini meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- 2) Retribusi Jasa Usaha, didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu, didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Yang dengan biaya penyelenggaraan pemberiaan izin disini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tertentu.

e. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Menurut Mardiasmo (2013:18) menjelaskan retribusi dipungut dengan menggunakan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan retribusi daerah (STRD). Penagihan retribusi terutang sebagaimana didahului dengan surat teguran.

f. Kadaluwarsa Penagihan Retribusi

Menurut Mardiasmo (2015:130) menjelaskan Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

g. Klasifikasi Pendapatan Retribusi Daerah

Menurut Siregar (2015:135) klasifikasi pendapatan retribusi daerah terdiri dari:

- 1) Retribusi Kesehatan adalah pembayaran atas jasa sarana dan jasa pelayanan kesehatan. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah (RSUD) dan tempat pelayan kesehatan lainnya. Subjek retribusi pelayanan

kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.

- 2) **Retribusi Persampahan/Kebersihan** adalah pembayaran pelayan persampahan atau kebersihan yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objek retribusi persampahan/ kebersihan adalah pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara kelokasi pembuangan akhir, serta penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. Subjek retribusi persampahan/kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang diberikan pelayanan pengangkutan sampah/kebersihan.
- 3) **Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil** adalah pembayaran atas penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi. Objek retribusi penggantian biaya cetak karu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama, dan akta kematian. Subjek retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil adalah orang pribadi yang menikmati pelayanan jasa percetakan KTP dan akta catatan sipil.

- 4) Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan parkir ditepi jalan umum atau tempat lain yang disediakan oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati jasa pelayanan dan tempat parkir ditepi jalan umum yang disediakan/ ditentukan oleh pemerintah daerah.
- 5) Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Objeknya adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa los, kios, yang dikelola pemerintah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan fasilitas pasar.
- 6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pembayaran atas pengujian kendaraan bermotor yang disediakan oleh pemerintah. Subjeknya adalah kendaraan mobil penumpang sedang, mobil penumpang jeep, mobil barang light truck, mobil barang truk, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga, dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa pengujian kendaraan bermotor.
- 7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas pelayanan pemeriksa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran dimiliki atau dipergunakan oleh masyarakat.

Objeknya adalah pelayanan pemeriksaan dan/ atau pengujian alat pemadam kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh pemerintah daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan jiwa dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/ atau dipergunakan oleh masyarakat. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

8) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pembayaran penggantian biaya cetak peta. Objeknya adalah biaya cetak peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis(struktur). Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penggantian biaya cetak peta yang disediakan oleh pemerintah daerah.

9) Retribusi Dan Atau Penyedotan Kakus adalah pembayaran atas pelayanan penyedotan kakus/jamban yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah pelayanan penyediaan atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa umum penyedotan kakus.

10) Retribusi Pengelolaan Limbah Cair adalah pembayaran yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menerima pelayanan pengelolaan limbah cair yang disediakan dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah pelayan pengelolaan limbah cair rumah tangga yang berasal dari rumah tangga, perkantoran , dan

industri yang disediakan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati limbah cair rumah tangga.

- 11) Retribusi Tera Ulang adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbang, dan pelengkapannya. Objeknya adalah kegiatan pemerintah daerah berupa pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang dan kalibrasi atas UTTP dari pemerintah daerah.
- 12) Retribusi Pendidikan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyelenggaraan dibidang pendidikan. Objeknya adalah pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah pelatihan komputer, pelatihan pembuatan furnitur, kursus bahasa asing, serta pelatihan aneka kejuruan seperti menjahit, memasak, tata rias, dan elektronik. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayan pendidikan dan pelatihan teknis diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 13) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pembayaran yang dipungut atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objeknya adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi

dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang membangun menara telekomunikasi kecuali menara telekomunikasi khusus.

- 14) Retribusi Pasar Grosir Atau Pertokoan adalah pembayaran atas pelayanan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan yang disediakan pemerintah daerah. Objeknya adalah penggunaan kios, sarana kebersihan, listrik, pelataran, perizinan, pemasangan reklame, perkantoran dan parkir. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar grosir atau pertokoan.
- 15) Retribusi Tempat Pelelangan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha penggunaan tempat pelanggan beserta sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objeknya adalah pelayanan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan dimiliki atau dikelola pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati jasa tempat pelelangan yang disediakan maupun diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 16) Retribusi Terminal adalah pembayaran atas pelayanan terminal yang disediakan, dimiliki, dan atau dikelola pemerintah daerah. Objeknya adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal adalah orang pribadi atau badan yang

menggunakan/ memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang disediakan dan atau diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

- 17) Retribusi tempat khusus parkir pembayaran atas pelayanan tempat khusus. objek retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/ atau oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan. Menikmati pelayanan parkir tempat khusus parkir.
- 18) Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/Villa adalah pembayaran penyediaan tempat penginapan, pesenggrahan, atau villa yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat penginapan, pesenggrahan, atau villa.
- 19) Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pungutan atas pelayanan rumah potong hewan. Objeknya adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan penyediaan rumah pemotongan hewan.
- 20) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pembayaran atas pelayanan penyelenggaraan kepelabuhan. Objeknya adalah pelayanan jasa kepelabuhan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah,

termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kepelabuhan dan memanfaatkan fasilitas pelabuhan.

- 21) Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga adalah pembayaran atas rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Objeknya adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga.
- 22) Retribusi Penyebrangan Air adalah pembayaran atas pelayanan jasa penyebrangan di air. Objek retribusi penyebrangan air adalah pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan penyebrangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/ atau dikelola oleh pemerintah daerah.
- 23) Retribusi Penjualan Produksi Usaha daerah adalah pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha daerah. Objeknya adalah bibit tanaman, bibit ternak, dan bibit atau benih ikan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.

- 24) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberi izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Objeknya adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah.
- 25) Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pungutan sebagai pembayaran atas pemberi izin tempat penjualan beralkohol. Objeknya adalah pemberi izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu. Tempat yang dimaksud adalah hotel berbintang, restoran tertentu, serta bar dan klub malam. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang dapat memperoleh izin tempat penjualan minuman beralkohol.
- 26) Retribusi Izin Gangguan adalah pembayaran atas segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman, dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus. Objeknya adalah tempat atau kegiatan usaha dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan bagi masyarakat dan lingkungan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang mendirikan, mengubah, menambah, dan/atau memperluas tempat usaha atau kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap masyarakat dan lingkungan.

- 27) Retribusi Izin Treyek adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa treyek tertentu dalam wilayah daerah. Objeknya adalah pemberian kepada orang orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu beberapa treyek tertentu. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin treyek.
- 28) Retribusi Izin Perikanan adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Objeknya adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Izin perikanan meliputi surat izin usaha perikanan, surat izin penangkapan ikan, surat izin kapal pengangkutan ikan. Subjeknya adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari pemerintah daerah.
- 29) Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu. Objeknya adalah penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang. Subjeknya adalah orang perseorangan dan badan hukum yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan,

koridor, atau kawasan yang dikenakan retribusi pengendalian lalu lintas.

- 30) Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Objeknya adalah pemberian perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing kepada pemberi kerja tenaga kerja asing. Subjeknya adalah pemberi kerja tenaga kerja asing.

4. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Klasifikasi pendapatan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Siregar (2015:142) pada dasarnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah berbentuk deviden, yaitu bagian laba yang diberikan kepada pemerintah daerah. Ada tiga kategori deviden yaitu Deviden atas penyertaan modal pada BUMD, BUMN dan perusahaan swasta.

5. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Klasifikasi pendapatan lain-lain PAD yang sah

Menurut Siregar (2015:143) hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan adalah penerimaan yang berasal dari penjualan aset tetap. Aset tetap yang tepat dijual pemerintah daerah meliputi penjualan tanah, peralatan, dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, serta penjualan aset tetap lainnya.

B. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Mentayani dkk (2014) yang berjudul Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. Tujuan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Secara parsial dan bersama sama pada Kabupaten dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. Variabel yang digunakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap pendapatan asli daerah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi. Teknik analisis dengan menggunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama sama berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan pengujian secara parsial diketahui bahwa Pajak Daerah terbukti mempunyai pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah demikian pula dengan Retribusi Daerah secara empiris berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kota dan Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu melakukan penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian asosiatif. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian ini

dilakukan pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan sedangkan penulis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kota Prabumulih.

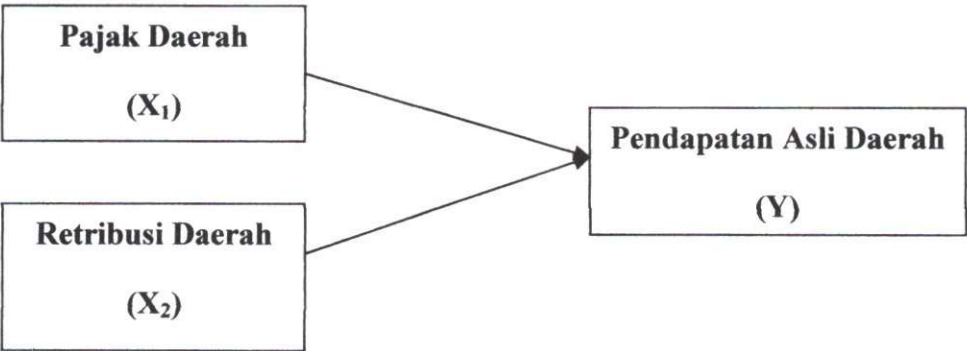
Fitria (2016) yang berjudul Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. Variabel yang digunakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu melakukan penelitian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian asosiatif. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang sedangkan penulis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kota Prabumulih dan penelitian ini menggunakan setelah dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah.

Toar dkk (2016) yang berjudul Kontribusi dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014). Variabel yang digunakan kontribusi dan penerimaan

Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tujuan untuk mengetahui kontribusi dan pengaruh penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu asosiatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan kontribusi dari Retribusi Daerah masuk pada kriteria sedang, Retribusi juga tidak berpengaruh Signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Persamaan penelitian dengan penulis yaitu melakukan penelitian penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. menggunakan jenis penelitian yang sama yaitu penelitian asosiatif dan menggunakan teknik pengumpulan data yang sama yaitu metode dokumentasi. Perbedaan penelitian dengan penulis yaitu terletak pada tempat penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Minahasa Selatan (2005-2014) sedangkan penulis pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah di Kota Prabumulih.

C. Kerangka Berpikir

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.
- b. Terdapat pengaruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial terhadap pendapatan asli daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:53-55), jenis penelitian tingkat eksplainsinya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penelitian yang bersifat membandingkan yang variabelnya sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenis penelitian menurut tingkat eksplanasi, maka jenis penelitian ini akan digunakan oleh penulis yaitu penelitian asosiatif jenis penelitian ini dipilih penulis karena pembahasan yang akan dilakukan merupakan suatu pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah dikota prabumulih.

B. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) beralamat di jalan jenderal sudirman KM 12, Kecamatan Cambai, kota prabumulih, provinsi sumatera selatan. Nomor telpon (0713) 3920019.

C. Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini memiliki oprasionalisasi variabel sebagai berikut:

Tabel III. 1
Operasionalisasi Variabel

NO	Variabel	Definisi	Indikator
1.	Pajak Daerah (X ₁)	Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat	Data Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2013–2015
2.	Retribusi daerah (X ₂)	Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus yang disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.	Data retribusi daerah tahun 2013-2015
3.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri dipungut berdasarkan peraturan daerah.	Data pendapatan asli daerah tahun 2013-2015

Sumber : Penulis, 2017

1. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2013: 389), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Populasi yang diteliti adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah sebanyak 10 tahun dari 2006 – 2015.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2013: 389), sampel adalah sebagian dari populasi itu. Dari 10 tahun laporan keuangan DPPKAD diambil 3 tahun sebagai sampel dari tahun 2013- 2015. Dari 3 tahun laporan keuangan maka sebanyak 36 sampel data perbulan yang dilakukan dalam penelitian ini.

E. Data Yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2013:402), data yang diperlukan terdiri dari sumber datanya, maka data terbagi menjadi dua:

1) Data primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data

2) Data sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Misalnya, lewat orang lain atau lewat dokumen.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh langsung dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Aset Daerah Kota Prabumulih

F. Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014:402-425) dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data dapat dilakukan sebagai berikut:

1) Interview (wawancara)

Interview merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

2) Kuisisioner (angket)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat tau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawabnya.

3) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

4) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data yang berasal dari dokumen-dokumen pada Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah.

G. Analisis Data Dan Teknik Analisis Data

1. Analisis Data

Menurut Sugiyono (2014:13-14) analisis data terdiri dari :

a) Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar.

b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah suatu metode analisis dengan menggunakan data berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan.

Metode Analisis Data yang digunakan yaitu Analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan laporan data realisasi pada kantor Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, kemudian hasil

pengelolaan data realisasi akan dijelaskan menggunakan kalimat-kalimat analisis Kualitatif.

2. Teknik Analisis

Teknik Analisis Data yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah dengan analisis regresi linier berganda untuk menyakinkan bahwa variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah mempunyai pengaruh variabel terikat terhadap pendapatan asli daerah, selanjutnya dilakukan uji hipotesis (uji t dan uji f) untuk mengetahui signifikansi dari variabel bebas pajak daerah dan retribusi daerah terhadap variabel terikat pendapatan asli daerah serta membuat kesimpulan dan yang terakhir adalah menghitung koefisien detreminasi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibantu oleh *statistical program for special science* (SPSS) versi 23. Sebelum melakukan analisis, sesuai dengan syarat metode OLS (*orinary least square*) merupakan salah satu metode dalam analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap variabel terikat adalah Pendapatan Asli Daerah maka terlebih dahulu dilakukan uji sebagai berikut:

Menurut sujarweni (2015: 225-229) metode analisis data dapat dikelompokkan menjadi empat yaitu:

a. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tabulasi menyajikan ringkasan, pengaturan atau penyusunan data dalam bentuk tabel numerik dan grafik.

b. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorow Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

c. Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik terdiri dari :

1) Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel sebelumnya. Mendeteksi autokorelasi dengan menggunakan nilai Durbin Watson dengan kriteria jika Nachrowi dan Usman (2002):

(1)Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.

(2)Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.

(3)Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

2) Uji Heterokedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2005).

3) Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas berarti ada hubungan linier yang sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel yang independen dari model yang ada. Akibat adanya multikolinearitas ini koefisien regresi tidak tertentu dan kesalahan standarnya tidak terhingga. Metode untuk menguji adanya multikolinearitas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflation factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* $> 0,1$ atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.

d. Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara variabel independen dan variabel linier dependen dengan skala pengukuran atau rasio dalam suatu persamaan dan menggunakan perangkat lunak SPSS. Persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Pendapatan Asli Daerah

a = Konstanta

X₁ = Penerimaan Pajak Daerah

X₂ = Retribusi Daerah

e = Error

1) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi (*Goodness of fit*) yang dinotasikan dengan R² merupakan suatu ukuran yang penting dalam regresi. Determinasi R² mencerminkan kemampuan variabel dependen. Tujuan analisis ini adalah untuk menghitung besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai R² menunjukkan seberapa besar proporsi total variasi variabel tidak bebas yang dapat dijelaskan oleh variabel penjelasnya. Semakin tinggi nilai R² maka semakin besar proporsi dari total variasi

variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen Ghozali (2005).

2) Uji Simultan (Uji F)

Signifikansi model regresi secara simultan diuji dengan melihat nilai signifikansi (sig) dimana jika nilai sig di bawah 0,05 maka variabel independen yaitu Pendapatan pajak daerah (X1), Retribusi Daerah (X2) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah (Y). Uji F-statistik digunakan untuk membuktikan ada pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

Kriteria :

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- a. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

3) Uji Hipotesis Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Apabila nilai probabilitas signifikansinya lebih kecil dari 0,05 (5%) maka suatu variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap

variabel dependen yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) $> 0,05$.

Kriteria :

- a. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Atau

- a. Jika $p < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $p > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Aset Daerah Kota Prabumulih

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam pembentukan UUD 1945 adalah” segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertibab dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA, “ dengan demikian RPMJD kota Prabumulih menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah kota prabumulih. Berdasarkan pasal 150 ayat (1) undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah perlu disusun perencanaan

pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional disebutkan bahwa perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis terarah, terpadu, dan tanggap terhadap perubahan, demikian juga perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan daerah tersebut disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsentrasi antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan daerah harus disusun secara terpadu, terukur, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan.

Mengingat struktur organisasi dan tata kerja dinas pendapatan pengelola keuangan dan aset daerah Kota Prabumulih, maka semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang milik negaraa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undang, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuan” maka penjabarab RPJMD kota Prabumulih kedalam RKPD Kota Prabumulih untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) Kota Prabumulih.

Sehubungan hal dimaksud, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun rencana strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota

Prabumulih. Untuk itulah dibentuk sebagai Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

2. Visi dan misi dinas pendapatan pengelolaan keuangan aset daerah prabumulih

a. Visi

Profesionalisme mengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah dalam mendukung terwujudnya Kota Prabumulih Prima.

b. Misi

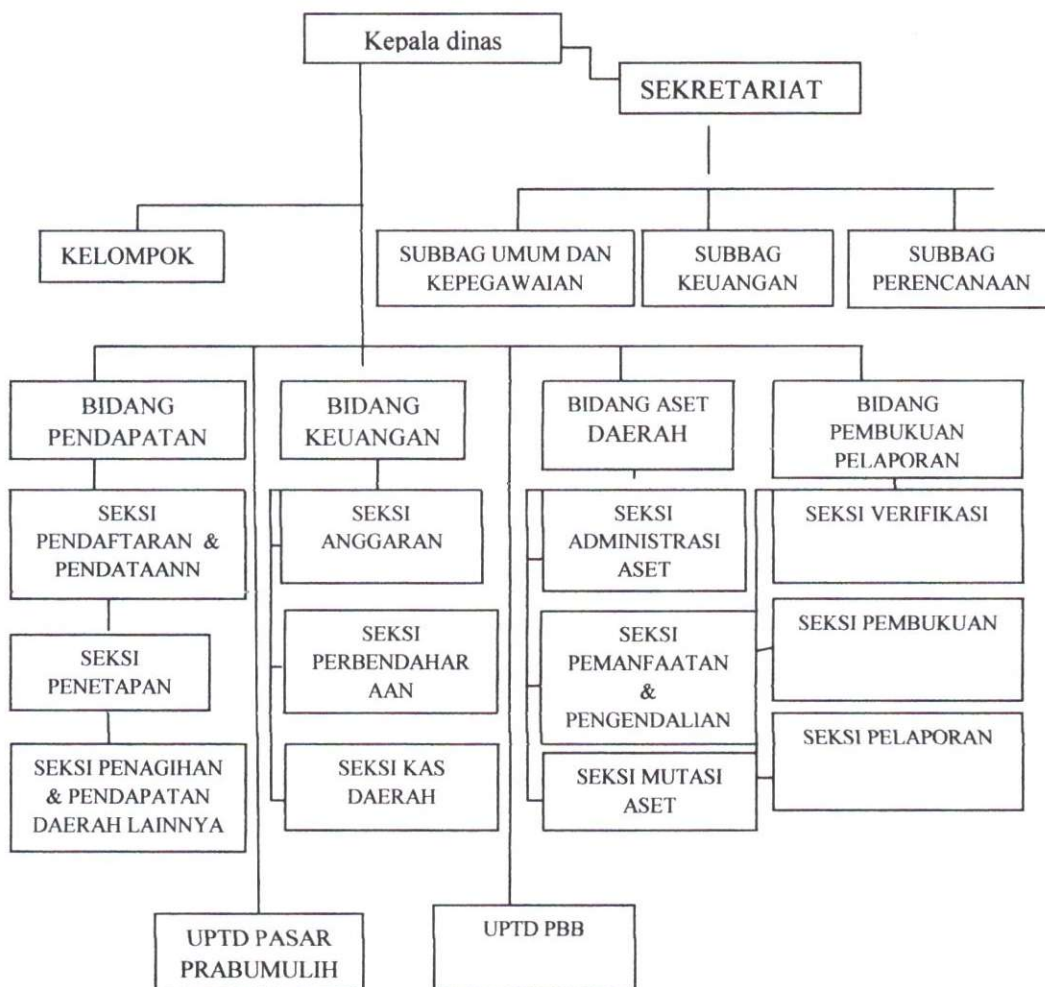
- 1) Meningkatkan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
- 3) Meningkatkan tertib administrasi pendapatan, keuangan, dan aset daerah
- 4) Meningkatkan tertib administrasi pembukuan dan pelaporan

3. Struktur organisasi dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota prabumulih

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam

usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang, tanggung jawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan. Struktur organisasi juga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik secara vertikal maupun horizontal. Organisasi yang dimaksud untuk membina keharmonisan kerja, agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara teratur dan penuh tanggung jawab. Sehingga rencana kerja dapat tercapai dengan hasil yang maksimal. Dengan berdasarkan perda No 12 Tahun 2014 tentang uraian tugas jabatan struktur dinas pengelola pendapatan keuangan dan aset daerah terdiri dari:

Gambar IV.1
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGELOLA
PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA
PRABUMULIH



Sumber : DPPKAD Kota Prabumulih, 2017

B. Hasil Pengelolaan Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan dan diolah berasal dari DPPKAD Kota Prabumulih yang menjadi sampel penelitian yang meliputi data:

- a. Pajak Daerah dari laporan Realisasi pendapatan dan belanja daerah anggaran per bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015
- b. Retribusi Daerah dari laporan Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran per bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015
- c. Pendapatan Asli Daerah dari laporan Realisasi pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran per bulan dari tahun 2013 sampai tahun 2015

1. Statistik Deskriptif

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah data 36 bulan dari tabel IV.1 menunjukkan hasil statistik deskriptif yaitu nilai maksimum rata-rata, dan deviasi standar (standar deviasi) dari variabel-variabel penelitian. Variabel-variabel tersebut meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, PAD. Dari tabel IV.1

Tabel IV.1
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Asli Daerah	32942241886,73	20075508150,447	36
Pajak Daerah	8551390963,26	5495594331,129	36
Retribusi Daerah	1297495411,72	892010564,361	36

Sumber : hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 23,2017

Berdasarkan tabel IV.1 dijelaskan bahwa jumlah data (N) yang diuji sebanyak 36, diperoleh gambaran nilai mean serta standar deviasi masing-masing variabel yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis data maka data diuji sesuai asumsi klasik yang bertujuan untuk mendapatkan regresi yang baik yang terbebas dari normalitas, multikolonieritas, autokorelasi, heteroskedasitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

a) Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorow Smirnov* satu arah. Pengambilan kesimpulan untuk menentukan apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak adalah dengan menilai nilai signifikannya. Jika signifikan $> 0,05$ maka variabel berdistribusi normal dan sebaliknya jika signifikan $< 0,05$ maka variabel tidak berdistribusi normal.

Berdasarkan hasil uji normalitas data untuk item-item variabel pajak daera (X_1), Retribusi Daerah (X_2), dan Pendapatan Asli Daerah (Y) dapat dilihat dengan hasil pengelolaan data dengan menggunakan SPSS. Berikut merupakan tabel hasil pengujian normalitas dengan menggunakan program SPSS Versi 23 dapat dilihat pada gambar 1V.2

Tabel 1V.2
Hasil Pengujian Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
N		36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8551390963,26	1297495411,72	32942241886,73
	Std. Deviation	5495594331,129	892010564,361	20075508150,44
Most Extreme Differences	Absolute	,104	,113	,084
	Positive	,104	,113	,084
	Negative	-,082	-,094	-,081
Test Statistic		,104	,113	,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan Hasil Uji Normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov test* untuk nilai signifikan (sig) Asymp (2-tailed) Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah adalah 0,200. Artinya bahwa Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai signifikansi (sig) lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pajak Daerah , Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah memiliki data yang berdistribusi normal hal ini dapat dilihat bahwa signifikansi dari 3 variabel tersebut lebih besar dari signifikansi alpha 0,05. Karena data berdistribusi normal tersebut, maka dapat dilakukan pengujian terhadap ke 3 variabel tersebut.

b) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian dalam regresi yaitu nilai dari variabel dependen titik berpengaruh terhadap nilai variabel itu sendiri. Untuk mendeteksi gejala autokorelasi kita menggunakan uji durbin watson dengan ketentuan jika durbin watson

- 1. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- 2. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- 3. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji durbin watson penelitian ini dibantu dengan SPSS Versi 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.3
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b										
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,962 ^a	,926	,922	561964155 2,508	,926	206,834	2	33	,000	,303

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
Sumber : Hasil Pengolahan data, 2017

Berdasarkan hasil pengujian diatas, nilai DW adalah 0,303 yang berarti nilai tersebut berada di antara -2 sampai + 2 jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi pada model dalam penelitian ini.

c) Uji Multikolineritas

Uji multikoloniritas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pentimpangan asumsi klasik. Uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (*independent variabel*). Untuk mendeteksi apakah terjadi multikoloneritas dapat dilihat dari nilai tolorencence dan variance inflation factor VIF. Metode untuk menguji adanya multikolineritas ini dapat dilihat dari *tolerance value* atau *variance inflantion factor* (VIF). Batas dari *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolineritas.

penelitian ini dibantu dengan SPSS 23 dengan hasil sebagai berikut:

Tabel IV.4
Hasil pengujian Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	,160	6,256
Retribusi Daerah	,160	6,256

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

sumber: hasil pengolahan data, 2017

berdasarkan tabel IV.4 diatas, menunjukkan output coefficient nilai VIF masing-masing Variabel pada kolom output coffecients untuk variabel X₁ 6,256 sebesar dan untuk variabel X₂ sebesar 6,256 kedua nilai variabel lebih besar dari 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi persoalan multikolonieritas antar variabel bebas dalam penelitian ini.

d) Uji Heteroskedasitas

Uji heterokedasitas adalah suatu keadaan dimana varians dan kesalahan pengganggu tidak konstan untuk semua variabel bebas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser yaitu dengan menguji tingkat signifikansinya. Apabila hasil uji di atas level signifikan ($r > 0,05$) berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan sebaliknya apabila level dibawah signifikan ($r < 0,05$) berarti terjadi heteroskedastisitas Ghozali (2005).

Tabel IV.5
Hasil Pengujian Heterokedasitas

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2897735041,752	1751132412,958		1,655	,107
Pajak Daerah	2,672	,432	,732	6,182	,000
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246	2,081	,045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.5 diatas, dari hasil Uji Glejser dilihat bahwa nilai signifikansi dari seluruh variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berada diatas 0,05 yang berarti model regresi tidak terdapat heterokedasitas.

e) Analisis Korelasi (R) Dan Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Tabel IV.6
Hasil Uji Korelasi Dan Koefisien Deteminasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.962 ^a	.926	.922	5619641552,508

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas dengan melalui program spss dapat di inteprestasikan sebagai berikut:

- 1) Nilai korelasi (R) diperoleh sebesar= 0,962 yang berarti bahwa hubungan atau tingkat asosiasi variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan variabel terikat yaitu Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Angka addjusted R Square (nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,926 memberikan makna bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mampu menjelaskan perubahan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 92,6% sedangkan sisanya 7,4 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

f) Analisis Regresi Linier Berganda

analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan atau berpengaruh atara variabel-variabel yang lebih dari satu dengan variabel-variabel terikat. Sebelum dilakukan uji hipotesis mengenai signifikan antara hubungan variabel bebas dan variabel terikat maka terlebih dahulu harus diketahui apa sebuah model memiliki hubungan

yang linier. Setelah melakukan regresi dengan SPSS Versi 23 maka hasil yang didapat adalah sebagai berikut:

Tabel IV.7
Hasil Uji Regresi

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
(Constant)	2897735041,752	1751132412,958	
Pajak Daerah	2,672	,432	,732
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Hasil pengolahan Data, 2017

Berdasarkan tabel IV.7 hasil regresi berganda yang peneliti lakukan pada variabel pajak daerah (X_1), Retribusi daerah (X_2), berpengaruh signifikan secara bersama terhadap pendapatan asli daerah (Y) dapat digambarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2$$

$$Y = 2.897.735.041,752 + 2,672 X_1 + 5,542X_2$$

Dari persamaan regresi tersebut menggambarkan bahwa:

- a. Konstanta sebesar 2.897.735.041,752 menyatakan bahwa jika variabel bebas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bernilai nol maka skor Pendapatan Asli Daerah adalah 2.897.735.041,752.
- b. Koefisien regresi X_1 sebesar 2,672 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor Pajak Daerah (X_1) akan meningkatkan skor Pajak Daerah Sebesar 2,672 dengan menjaga variabel lain tetap/konstanta.

- c. Koefisien regresi X_2 5,542 bernilai positif menyatakan bahwa setiap penambahan satu satuan skor Retribusi Daerah (X_2) akan meningkatkan skor Retribusi Daerah sebesar 5,542 dengan menjaga variabel lain tetap/konstanta.

Artinya koefisien regresi b_1 memiliki arti bahwa jika Variabel Pajak Daerah (X_1) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, yang artinya variabel Pajak Daerah (X_1) memberi pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), jadi semakin tinggi variabel Pajak Daerah (X_1) maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (Y), atau semakin rendah variabel Pajak Daerah (X_1) maka semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan koefisien b_2 Memiliki arti bahwa jika variabel Retribusi Daerah (X_2) meningkat sebesar satu satuan, maka Pendapatan Asli Daerah (Y) akan meningkat koefisien regresi tersebut bernilai positif yang artinya variabel Retribusi Daerah (X_2) memberikan pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), jika semakin tinggi variabel Retribusi Daerah (X_2) maka semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah (Y), atau semakin rendah variabel Retribusi Daerah (X_2) maka semakin rendah pula Pendapatan Asli Daerah (Y).

3. Uji Hipotesis

1) Uji F (Simultan)

Pengujian hipotesis pengaruh pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah. Uji F ini menguji apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut:

H_0 : tidak adanya pengaruh yang signifikan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kota Prabumulih.

H_a : adanya pengaruh yang signifikan pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Prabumulih

Hipotesis statistik diatas dapat diartikan bahwa H_0 menunjukkan variabel bebas, dan H_a menunjukkan variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel tidak bebas. Menguji hipotesis tersebut menggunakan uji statistik F, yaitu dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} pada $\alpha=0,05$ dengan kriteria keputusan:

- a. Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Berikut ini adalah tabel hasil uji F (bersama-sama) yang diperoleh dengan menggunakan SPSS.

Tabel IV.8
Hasil uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	130637587135563 48000000,000	2	65318793567781 74000000,000	206,834	,000 ^b
	Residual	104215224889624 4800000,000	33	31580371178674 086000,000		
	Total	141059109624525 92000000,000	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah
b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah
Sumber: Hasil Pengolahan Data, 2017

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa diketahui nilai F_{hitung} diperoleh sebesar 206,834 lebih besar dari F_{tabel} (3,28), hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikansi sebesar 0,000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha=0,05$ artinya H_0 ditolak sedangkan H_a diterima. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah.

Dari hasil uji F juga diketahui bahwa nilai signifikansi (sig) yang muncul adalah sebesar 0,000 yang berarti $\text{sig } F (0,000) \leq \alpha (0,05)$, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat sinifikasi yang kuat terjadi pada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Maka kesimpulannya Pajak Daerah (X_1) dan Retribusi Daerah (X_2) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

2) Uji t (Uji Parsial)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen atau variabel penjelas secara individual dalam menerangkan variabel dependen yaitu Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji t digunakan untuk menguji koefisien regresi secara parsial dari variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

H_{01} = Pajak Daerah tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_{a1} = Pajak Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_{02} = Retribusi Daerah tidak berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

H_{a2} = Retribusi Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hipotesis diterima jika taraf signifikan (α) $< 0,05$ dan hipotesis ditolak jika taraf signifikan (α) $> 0,05$.

Kriteria :

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Hasil uji statistik t merupakan suatu bentuk analisis parsial untuk masing-masing variabel bebas terhadap variabel tidak bebas. Hasil uji t berguna untuk mengetahui apakah secara individual variabel (X) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Y) atau tidak.

Besarnya koefisien parsial dan hasil uji statistik t dengan menggunakan SPSS disajikan dalam bentuk tabel ini.

Tabel IV.9
Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2897735041,752	1751132412,958		1,655	,107
Pajak Daerah	2,672	,432	,732	6,182	,000
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246	2,081	,045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

sumber : Hasil Pengolahan Data, 2017

- 1) H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis menunjukkan Pajak Daerah (X_1) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti bila Pajak Daerah ditingkatkan, maka Pendapatan Asli Daerah juga meningkat. Dari hasil SPSS terlihat bahwa nilai t_{hitung} 6,182 dengan nilai sig 0,000 < 0,05 dengan nilai t_{hitung} 6,182 > t_{tabel} 2,032. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- 2) H_0 ditolak dan H_a diterima. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa Retribusi Daerah (X_2) mempunyai hubungan positif atau searah, hal ini berarti bila Retribusi Daerah ditingkatkan maka pendapatan asli daerah juga meningkat. Dari hasil SPSS terlihat bahwa nilai koefisien regresi menunjukkan sebesar t_{hitung} 2,081 dengan nilai sig 0,045 < 0,05 dengan nilai t_{hitung} 2,081 > t_{tabel} 2,032. Jadi dapat disimpulkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Hasil Uji Hipotesis Pajak Daerah (X1) Dan Retribusi Daerah (X2)

Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

H₁ = Pajak Daerah (X1) Dan Retribusi Daerah (X2) Secara Simultan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara simultan pada penelitian menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah disebabkan Pajak Daerah setiap bulan mengalami peningkatan dari penerimaan Pajak Daerah, hanya pada tahun 2015 Pajak Daerah dikota Prabumulih tidak tercapainya anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah disebabkan faktor kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan dan target Pendapatan Asli Daerah itu sendiri mengalami kenaikan yang cukup besar yang awalnya hanya Rp 78.442.000.000 menjadi Rp 91.280.000.000 atau bertambah menjadi sekitar Rp 12.838.000.000. Sebaiknya Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan lagi dengan meningkatkannya unsur-unsur PAD. Menurut siregar (2015:31) unsur-unsur PAD meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Salah satu penyumbang PAD yang terbesar yaitu dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah adalah penerimaan pajak yang berasal dari unsur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerang jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari unsur tersebut yang sangat mendukung di Kota Prabumulih Dalam beberapa unsur tersebut Pemerintah harus berkonsentrasi dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Pajak daerah akan lebih meningkat lagi jika Meningkatkan pembangunan di Kota Prabumulih, dari pembangunan tersebut maka dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak daerah, semakin banyak penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih. Yang mana Pendapatan Asli Daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Selain pajak daerah penyumbang Pendapatan Asli Daerah yang terbesar yaitu dari Retribusi Daerah.

Retribusi Umum terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan Dan/ Atau Penyedotan Kakus. Retribusi Jasa Usaha Terdiri Dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Dan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri Dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Dan Retribusi Izin Trayek. Dalam unsur tersebut pemerintah harus dapat

berkonsentrasi dalam meningkatkan pendapatan Retribusi Daerah dengan menambahkan pembangunan-pembangunan dapat diperbanyak lagi agar dapat membantu peningkatan pendapatan Retribusi daerah karena semakin banyaknya pendapatan Retribusi Daerah Maka dapat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih untuk selanjutnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh mentayani dkk (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah dan Retribusi daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

2) Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Pengaruh Pajak Daerah (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

H_1 = Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial pada penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah, penerimaan Pajak Daerah daerah dikota Prabumulih sudah termasuk tinggi akan tetapi Pajak Daerah sebaiknya dapat ditingkatkan lagi karena Pajak Daerah termasuk salah satu penyumbang terbesar dari pendapatan asli daerah. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dari pernyataan tersebut maka Pajak Daerah berarti salah satu penerimaan terpenting dalam pendapatan pemerintah. dilihat dari laporan raealisasi anggaran dan belanja dikota prabumulih yang didapatkan oleh

DPPKAD hampir setiap tahunnya Pajak Daerah mengalami peningkatan akan tetapi hanya pada tahun 2015 Pajak Daerah tidak mengalami realisasi yang ditetapkan oleh pemerintah hal tersebut disebabkan karena kondisi ekonomi masyarakat yang masih belum stabil khususnya akibat harga karet masih rendah, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat, sehingga kalangan pelaku usaha mengalami penurunan omset. Dampaknya seperti rumah makan, hotel dan restoran serta lainnya mengalami kesulitan ekonomi.

Pajak Daerah adalah penerimaan pajak yang berasal dari unsur Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak penerang jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dari unsur tersebut yang sangat mendukung di Kota Prabumulih Dalam beberapa unsur tersebut Pemerintah harus berkonsentrasi dalam meningkatkan pendapatan Pajak Daerah. Pajak daerah akan lebih meningkat lagi jika Meningkatkan pembangunan di Kota Prabumulih, dari pembangunan tersebut maka dapat membantu meningkatkan penerimaan Pajak daerah, semakin banyak penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih. Yang mana Pendapatan Asli Daerah itu sendiri bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Jika dilihat dari penerimaan Pajak Daerah dalam pertahun Pajak Daerah mengalami tercapainya target hanya pada tahun 2015 Pajak Daerah tidak mengalami tercapainya target akan tetapi peningkatan penerimaan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup besar sedangkan dalam perbulan Pajak Daerah tidak selalu tercapai target yang ditetapkan pemerintah tetapi setiap bulan penerimaan pajak daerah dikota prabumulih mengalami selalu peningkatan. salah satu contoh dari keseluruhan pajak daerah yang banyak didapatkan oleh pemerintah daerah yaitu dari pajak hotel, rumah makan, hiburan, reklame, pajak sarang burung walet.

Didalam hal ini pertumbuhan hotel dikota prabumulih selalu meningkat pada tahun 2013 hotel di prabumulih memiliki 16 hotel, pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 meningkat menjadi 21 hotel, seharusnya dalam peningkatan hotel penerimaan seperti pajak hotel dapat lebih banyak tercapainya target yang didapatkan pemerintah karena dapat membantu penyumbangan dari penerimaan Pajak Daerah agar Pajak Daerah dapat meningkat, Pajak Restoran pada tahun 2014 berjumlah 185 akan tetapi dari banyaknya restoran pajak restoran tidak mencapai target setiap bulan seharusnya banyaknya restoran dapat membantu penerimaan pajak restoran yang didapatkan pada tahun 2015 pajak restoran sebanyak 171 mengalami penurunan salah satu faktor disebabkan kondisi ekonomi masyarakat dikota prabumulih menurun. Pajak hiburan pada tahun 2013 sebanyak 14 dan pada tahun 2015 pajak hiburan mengalami peningkatan sebanyak 27 yang ada

dikota prabumulih akan tetapi penerimaan untuk pajak hiburan itu sendiri setiap bulan selalu tidak tercapai.

Pajak Reklame pada tahun 2014 untuk Pajak Reklame itu sendiri 2014 ada 255 dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 495 Pajak Reklame dari peningkatan Pajak Reklame akan tetapi Pajak Reklame itu sendiri setiap bulannya tidak mengalami tercapainya target, seharusnya dari pertambahan pajak reklame itu akan dapat tercapainya target yang ditetapkan pemerintah dan dapat membantu peningkatan penerimaan Pajak Daerah itu sendiri. Dan untuk Pajak Sarang Burung Walet di Kota Prabumulih pada tahun 2013 sebanyak 12 dan pada tahun 2015 mengalami penurunan Pajak Sarang Burung Walet sebanyak 11. Dapat dilihat dari setiap peningkatan Pajak Sarang Burung Walet akan tetapi untuk peningkatan tersebut tidak ada teralisasi yang ditargetkan pemerintah seharusnya dari peningkatan tersebut dapat kita pergunakan untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah itu sendiri. Sebaiknya agar dapat tercapainya anggaran yang ditetapkan pemerintah memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa pentingnya untuk membayar pajak agar masyarakat itu sendiri dapat menyadari pentingnya Pajak Daerah dapat membantu pembangunan dan pertumbuhan perekonomian suatu daerah.

Berkaitan dengan hasil penelitian Muhammad (2014) yang telah diuraikan pada bab kajian pustaka sebelumnya, dengan hasil menyatakan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Tidak sejalan dengan penelitian saya terdapat bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

3) Hasil Uji Hipotesis Secara Parsial Pengaruh Retribusi Daerah (X_1) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

H_2 = Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil uji hipotesis secara parsial pada penelitian ini menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Untuk Retribusi Daerah itu sendiri untuk setiap bulannya mengalami tidak tercapainya target yang ditetapkan pemerintah akan tetapi Retribusi Daerah mengalami peningkatan realisasi setiap bulannya. Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009 bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Retribusi Daerah sangat penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintah daerah, Retribusi Umum terdiri dari Retribusi pelayanan kesehatan, Retribusi Pelayanan Persampahan/kebersihan, Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk dan Akta catatan sipil, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Pasar,

Retribusi Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penyediaan Dan Atau Penyedotan Kakus. Retribusi Jasa Usaha Terdiri Dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Dan Retribusi Perizinan Tertentu terdiri Dari Retribusi Izin Gangguan/Keramaian Dan Retribusi Izin Trayek. Dalam unsur tersebut pemerintah harus dapat berkonsentrasi dalam meningkatkan pendapatan Retribusi Daerah dengan menambahkan pembangunan-pembangunan dapat diperbanyak lagi agar dapat membantu peningkatan pendapatan Retribusi daerah karena semakin banyaknya pendapatan Retribusi Daerah Maka dapat membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih.

Maka dari itu Retribusi Daerah dapat ditingkatkan lagi dalam penerimaan karena semakin tingginya retribusi daerah tersebut maka akan semakin tinggi juga dalam penyumbangan pendapatan PAD, maka dari tingginya peningkatan tersebut dapat membantu perekonomian suatu daerah, dengan Peningkatan Retribusi Daerah pemerintah harus berkonsentrasi untuk dapat memperhatikan suatu penerimaan Retribusi Daerah itu sendiri.

Dimana pembangunan-pembangunan di Kota Prabumulih sudah mengalami banyaknya peningkatan akan tetapi penerimaan untuk retribusi itu sendiri belum tercapainya target, seharusnya Retribusi Daerah dapat ditingkatkan lagi karena Retribusi Daerah termasuk salah satu penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah.

Berkaitan dengan hasil penelitian Toar (2016) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak sejalan dengan penelitian saya terdapat bahwa Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara simultan terhadap pendapatan asli daerah pada DPPKAD Kota Prabumulih
2. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Kota Prabumulih.
3. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara Parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah pada DPPKAD Kota Prabumulih.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah salah satunya dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai potensi daerah yang dimiliki oleh masing-masing daerah agar masyarakat dan investor lebih tertarik menanamkan modalnya, karena penerimaan retribusi daerah masih jauh dibandingkan dengan penerimaan pajak daerah yang lebih dominan mempengaruhi peningkatan PAD pada Kota Prabumulih.
2. Pemerintah daerah sebaiknya melakukan pemungutan dan penagihan pajak secara berkala sehingga tidak terjadi pembayaran yang lewat jatuh tempo. Serta meningkatkan pelayanan pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak itu sendiri.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya memperluas ruang lingkup penelitian yang lebih luas dengan variabel yang lain seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, karena hasil yang diperoleh bisa saja berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, indra. (2002). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Edisi Pertama
- Fitria, Halkadri. (2016). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Padang Setelah Dikeluarkannya Undang-Undang Otonomi Daerah. (*jurnal praktik bisnis*), (online), Vol. 5, No. 1, ([http:// ejournal.unp.ac.id](http://ejournal.unp.ac.id), diakses mei 2016).
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Mentayani Ida, Rusmanto Dan Mirda Letiana. (2014). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. (*Jurnal ekonomi dan bisnis*), (online), Vol. 7, No. 1, ([http:// journal. Strienas ypb. ac.id](http://journal.strienas.ypb.ac.id), diakses 1 maret 2014).
- Halim, abdul. (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Selemba Empat
- Muhammad, rian. (2014). Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (*Jurnal ekonomi dan bisnis*), (online), (<http://journal.unsil.ac.id>).
- Siregar,Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Edisi pertama
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Kedelapan Belas.Bandung: CV Alfabeta.
- Sujarweni, V.Wiratna. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Cetakan Kesatu. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Toar waraney lakoy, Daisy S.M Engka, dan Steeva Y.l Tumangkeng (2016). Kontribusi Dan Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Minahasa Selatan. (*jurnal berkala ilmiah efisiensi*), (online), Vol. 16, No. 1, ([http:// ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id)).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah* jakarta: Presiden Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah* jakarta: Presiden Republik Indonesia

**Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih
(Studi Kasus Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah) Realisasi Anggaran Perbulan 2013-2015**

Tahun	Bulan	Pajak daerah		Retribusi daerah		Pendapatan asli daerah	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
2013	Januari	9.441.000.000,00	901.521.310,00	3.556.000.000,00	189.033.400,00	33.863.710.100,00	5.117.896.204,00
	Februari	9.441.000.000,00	2.028.590.929,05	3.556.000.000,00	359.016.400,00	33.863.710.100,00	8.840.890.437,05
	Maret	9.441.000.000,00	2.827.576.245,05	3.556.000.000,00	521.969.400,00	33.863.710.100,00	11.210.442.801,05
	April	9.441.000.000,00	3.667.024.236,05	3.556.000.000,00	641.130.200,00	33.863.710.100,00	13.830.090.150,05
	Mei	9.441.000.000,00	4.779.623.041,05	3.556.000.000,00	812.620.100,00	33.863.710.100,00	18.489.748.965,05
	Juni	9.441.000.000,00	6.045.909.686,05	3.556.000.000,00	975.827.700,00	33.863.710.100,00	23.945.569.916,01
	Juli	9.441.000.000,00	7.565.552.358,05	3.556.000.000,00	1.169.443.100,00	33.863.710.100,00	28.465.416.534,44
	Agustus	9.441.000.000,00	8.650.725.458,05	3.556.000.000,00	1.499.611.900,00	33.863.710.100,00	31.391.593.408,44
	September	9.441.000.000,00	9.613.623.276,05	3.556.000.000,00	2.024.728.100,00	33.863.710.100,00	35.119.729.266,25
	Oktober	9.441.000.000,00	10.982.179.812,05	3.556.000.000,00	2.254.671.200,00	33.863.710.100,00	38.971.108.293,47
	November	9.441.000.000,00	12.448.097.948,05	3.556.000.000,00	2.475.435.750,00	33.863.710.100,00	43.202.792.960,47
	Desember	9.441.000.000,00	14.339.310.860,05	3.556.000.000,00	3.250.045.950,00	33.863.710.100,00	51.168.237.018,87
2014	Januari	17.005.000.000,00	1.174.943.954,00	4.880.000.000,00	181.698.300,00	51.875.246.244,00	4.908.910.582,73
	Februari	17.005.000.000,00	2.343.855.190,00	4.880.000.000,00	320.954.000,00	51.875.246.244,00	8.440.657.786,73
	Maret	17.005.000.000,00	3.377.684.272,00	4.880.000.000,00	455.737.200,00	51.875.246.244,00	11.635.537.032,73
	April	17.005.000.000,00	4.484.787.758,00	4.880.000.000,00	568.603.360,00	51.875.246.244,00	15.237.940.296,26
	Mei	17.005.000.000,00	5.815.845.640,00	4.880.000.000,00	734.702.460,00	51.875.246.244,00	20.034.951.216,37
	Juni	17.005.000.000,00	7.431.461.293,00	4.880.000.000,00	918.194.410,00	51.875.246.244,00	24.886.758.526,84
	Juli	17.005.000.000,00	8.987.743.130,00	4.880.000.000,00	1.098.133.610,00	51.875.246.244,00	30.290.768.689,48
	Agustus	17.005.000.000,00	10.339.550.867,00	4.880.000.000,00	1.254.378.510,00	51.875.246.244,00	34.615.662.512,80
	September	17.005.000.000,00	13.156.533.277,00	4.880.000.000,00	1.457.709.460,00	51.875.246.244,00	39.942.356.712,63
	Oktober	17.005.000.000,00	14.664.721.238,00	4.880.000.000,00	1.608.384.960,00	51.875.246.244,00	44.163.959.598,31
	November	17.005.000.000,00	16.448.742.540,00	4.880.000.000,00	1.792.131.510,00	51.875.246.244,00	50.428.346.967,73
	Desember	17.005.000.000,00	18.822.366.243,00	4.880.000.000,00	2.104.981.860,00	51.875.246.244,00	64.169.588.731,40
2015	Januari	17.010.000.000,00	1.157.532.012,00	5.850.000.000,00	124.057.750,00	78.442.000.000,00	9.512.166.606,99
	Februari	17.010.000.000,00	2.481.625.323,00	5.850.000.000,00	250.724.550,00	78.442.000.000,00	15.795.861.830,43
	Maret	17.010.000.000,00	3.700.807.968,00	5.850.000.000,00	416.647.254,00	78.442.000.000,00	21.044.663.991,97
	April	17.010.000.000,00	4.966.652.805,00	5.850.000.000,00	565.121.314,00	78.442.000.000,00	27.127.995.946,45
	Mei	17.010.000.000,00	6.565.663.224,00	5.850.000.000,00	890.112.714,00	78.442.000.000,00	32.532.806.636,66
	Juni	17.010.000.000,00	8.307.098.866,00	5.850.000.000,00	1.375.912.073,00	78.442.000.000,00	39.910.423.944,63
	Juli	17.010.000.000,00	9.970.934.629,00	5.850.000.000,00	1.659.968.437,00	78.442.000.000,00	48.943.182.552,99
	Agustus	17.010.000.000,00	11.890.132.443,00	5.850.000.000,00	2.040.190.652,00	78.442.000.000,00	54.171.021.550,44
	September	17.010.000.000,00	14.410.009.920,00	5.850.000.000,00	2.209.362.392,00	78.442.000.000,00	61.827.890.793,39
	Oktober	17.010.000.000,00	15.880.649.229,00	5.850.000.000,00	2.570.687.742,00	78.442.000.000,00	67.446.956.269,24
	November	17.010.000.000,00	17.441.240.761,00	5.850.000.000,00	2.853.788.302,00	78.442.000.000,00	76.862.749.224,98
	Desember	17.010.000.000,00	20.179.756.935,80	5.850.000.000,00	3.084.118.802,00	78.442.000.000,00	72.236.033.964,81

STATISTIK DESKRIPTIF

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Asli Daerah	32942241886,73	20075508150,447	36
Pajak Daerah	8551390963,26	5495594331,129	36
Retribusi Daerah	1297495411,72	892010564,361	36

UJI NORMALITAS

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah
N		36	36	36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8551390963,26	1297495411,72	32942241886,73
	Std. Deviation	5495594331,129	892010564,361	20075508150,447
Most Extreme Differences	Absolute	,104	,113	,084
	Positive	,104	,113	,084
	Negative	-,082	-,094	-,081
Test Statistic		,104	,113	,084
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}	,200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

UJI AUTOKORELASI

Model Summary ^a					
Change Statistics					Durbin-Watson
R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
,926	206,834	2	33	,000	,303

- a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

UJI MULTIKOLINERITAS

Coefficients ^a		
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Pajak Daerah	,160	6,256
Retribusi Daerah	,160	6,256

- a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

UJI HETEROSKEDASITAS

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2897735041,752	1751132412,958		1,655	,107
Pajak Daerah	2,672	,432	,732	6,182	,000
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246	2,081	,045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

UJI KORELASI DAN DETERMINASI

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,962 ^a	,926	,922	5619641552,508

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

UJI REGRESI

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
	B	Std. Error	Beta
1 (Constant)	2897735041,752	1751132412,958	
Pajak Daerah	2,672	,432	,732
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

UJI F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	130637587135563 48000000,000	2	65318793567781 74000000,000	206,834	,000 ^b
Residual	104215224889624 4800000,000	33	31580371178674 086000,000		
Total	141059109624525 92000000,000	35			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

UJI T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2897735041,752	1751132412,958		1,655	,107
Pajak Daerah	2,672	,432	,732	6,182	,000
Retribusi Daerah	5,542	2,663	,246	2,081	,045

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH
BADAN KEUANGAN DAERAH

Kantor Pemerintah Kota Prabumulih Lantai Dasar
Jln. Jend. Sudirman Km 12 Kecamatan Cambai Telp/Fax. 0713 – 3920020
PRABUMULIH, SUM-SEL 31114 website www.kotaprabumulih.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 900/ 108 /BKD/2017

g bertandatangan di bawah ini :

1a : A. Zahedi, S.Pd.,MM
: 196305011988031005
gkat / Gol.Ruang : Pembina Tingkat I / IV.b
atan : Sekretaris Badan Keuangan Daerah Kota Prabumulih

gan ini menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

1a : DIAN PERMATA SARI
: 222013201
erjaan : Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah, Palembang

1 melakukan penelitian di Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota
umulih dengan proposal penelitian berjudul : " Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan
ibusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Prabumulih " terhitung sejak tanggal 1
ember 2016 sampai dengan selesai.

ikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Prabumulih, 31 Januari 2017

a n KEPALA BADAN

Sekretaris,



A. Zahedi, S.Pd.,MM
Pembina Tingkat I / IV.b
NIP. 196305011988031005



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

Unggul dan Islami

Sertifikat

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DIBERIKAN KEPADA :

NAMA : DIAN PERMATA SARI
NIM : 222013201
PROGRAM STUDI : Akuntansi

Yang dinyatakan **HAFAL / TAHFIDZ (26)** Surat Juz Amma
di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang

Palembang, Rabu, 24 Agustus, 2016



Wakil Dekan IV
Dr. Purwaningsyah Ariadi, M.Hum
NEMNIDN : 731454/0215126902



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
LEMBAGA BAHASA

Jalan Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263

Telp. (0711) 512637 - Fax. (0711) 512637

email. lembagabahasaump@yahoo.co.id



TEST OF ENGLISH ABILITY SCORE RECORD

Name : Dian Permata Sari
Place/Date of Birth : Prabumulih, April 11th 1995
Test Times Taken : +3
Test Date : February, 03rd 2017

Scaled Score

Listening Comprehension : 47
Structure Grammar : 34
Reading Comprehension : 39
OVERALL SCORE : 400

Palembang, February, 06th 2017
Chairperson of Language Institute


LEMBAGA BAHASA
Rini Susanti, S.Pd., M.A.
Univ. Muhammadiyah Palembang

No. 477/TEA FE/LB/UMP/II/2017

NBM/NIDN. 1164932/0210098402

1236211121215



INSTITUT PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
STATUS TERAKREDITASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PMU PA

No. 118/H-4/LPKKN/UMP/XI/2016

Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang menerangkan bahwa:

Nama : DIAN PERMATA SARI
Nomor Pokok Mahasiswa : 222013201
Fakultas : EKONOMI DAN BISNIS
Tempat Tgl. Lahir : PRABUMULIH, 11-04-1995

telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata Tematik Posdaya Angkatan ke-11 yang dilaksanakan dari tanggal 20 Juli sampai dengan 3 September 2016 bertempat di:

Kelurahan/Desa : 8 ULU (B)
Kecamatan : SEBERANG ULU I
Kota/Kabupaten : PALEMBANG
Dinyatakan : Lulus

Palembang, 17 September 2016
Rektor,



Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M.
NBM/NIDN. 743462/0230106301



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA :	DIAN PERMATA SARI	PEMBIMBING :	
NIM :	222013201	KETUA :	NINA SABRINA, S.E., M.Si
PROGRAM STUDI :	AKUNTANSI	ANGGOTA :	
JUDUL SKRIPSI :	PENGARUH PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA PRABUMULIH (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah)		

NO.	TGL/BLN/TH KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING		KETERANGAN
			KETUA	ANGGOTA	
1.	22/11 - 2016	BAB I, II dan III			Acc lanjut IV, dan
2.					V
3.					
4.					
5.	24/1 - 2017	BAB IV dan BAB V			Perbaikan BAB IV
6.					ambahan
7.					Populasi & Sampel
8.					
9.	26/1 - 2017	BAB IV			Perbaikan
10.					
11.	31/1 - 2017	BAB IV			Perbaikan BAB IV
12.					V/ Simultan
13.					
14.	1/2 - 2017	BAB IV & BAB V			Perbaikan
15.	3/2 - 2017	BAB IV & BAB V			Acc lanjut V/power
16.					point dll / Acc V/keomp

CATATAN :

Mahasiswa diberikan waktu menyelesaikan skripsi, 6 bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Palembang

Pada tanggal : / /

Dekan

Program Studi

B. H. Strajuddin, S.E., Ak., M.Si., Ca





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

AKREDITASI

INSTITUSI PERGURUAN TINGGI
PROGRAM STUDI MANAJEMEN (S1)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI (S1)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PEMASARAN (D3)

Nomor : 027 /SK/BAN-PT/Akred /PT/I / 2014 (B)
Nomor : 044 /SK/BAN-PT/Akred /S/I / 2014 (B)
Nomor : 1262 /SK/BAN-PT/Akred /S/XII/ 2015 (B)
Nomor : 771 /SK/BAN-PT/Akred /Dpl-III/VII/ 2015 (B)

site : fe.umpalembang.ac.id

Email : febumpg@umpalembang.ac.id

Alamat : Jalan Jendral Ahmad Yani 13 Ulu Palembang 30263 Telp. (0711)511433 Faximile (0711)518018

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN SKRIPSI

Hari / Tanggal : Selasa, 28 Februari 2017
Waktu : 08.00-12.00 WIB
Nama : Dian Permata Sari
Nim : 222013201
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Prabumulih (Studi Kasus Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Aset Daerah)

TELAH DI PERBAIKI DAN DISETUJUI OLEH TIM PENGUJI DAN
PEMBIMBING SKRIPSI DAN DIPERKENANKAN
UNTUK MENGIKUTI WISUDA

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	TGL PERSETUJUAN	TANDA TANGAN
1	Nina Sabrina, S.E.,M.Si	Pembimbing	6/3 - 2017	
2	Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA	Ketua Penguji	6/3 - 2017	
3	Drs. Sunardi, S.E., M.Si	Penguji I	6/3 - 2017	
4	Nina Sabrina, S.E.,M.Si	Penguji II	6/3 - 2017	

Palembang, Maret 2017
Dekan
u.b Ketua Program Studi Akuntansi

Betri Sirajuddin, S.E.,M.Si.,Ak.,CA
NIDN/NBM: 0216106902/944806



Biodata

Nama : Dian Permata Sari

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat, tanggal lahir : Prabumulih 11 April 1995

Agama : Islam

Alamat : No. 09 Rt.05 Rw. 03 kel.
Gunung ibu kec. Prabumulih Timur

Asal : Prabumulih

Telp / Hp : 089617466496

Email : dian_cutez95@yahoo.com

Pendidikan :

1. SD Negeri 49 Prabumulih
2. SMP Negeri 8 Prabumulih
3. SMA Negeri 2 Prabumulih

Nama Orang Tua/Pekerjaan :

1. Ayah : Estwiyono
2. Ibu : Yuran

Alamat Orang Tua : jl. Halmahera No. 09 Rt.05 Rw. 03 kel.
Gunung ibu kec. Prabumulih Timur